

Katalog: 3205011.3322



ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG 2023 VOLUME 4, 2024

<https://semarangkab.bps.go.id>

ANALISIS KEMISKINAN

KABUPATEN SEMARANG 2023

VOLUME 4, 2024



ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG 2023

Volume 4, 2024

Katalog : 3205011.3322
Nomor Publikasi : 33220.24007

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 56 halaman

Penyusun Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Pembuat Kover :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Penerbit :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari BPS Kabupaten Semarang.





TIM PENYUSUN

Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023

Volume 4, 2024

Pengarah

Dewi Trirahayuni

Penanggungjawab

Wiwit Santi Wahyuningsih

Penyunting

Wiwit Santi Wahyuningsih

Penulis

Annie Yuliati

Maria Yoana Kurniawati

Retabulasi

Annie Yuliati

Infografis

Maria Yoana Kurniawati

Penata Letak

Maria Yoana Kurniawati

Desain Kulit

Maria Yoana Kurniawati



<https://semarangkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Data dan informasi kemiskinan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Susenas pada Bulan Maret memberikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Susenas pada bulan September menghasilkan angka estimasi hanya sampai tingkat provinsi.

Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023 memberikan informasi lengkap mengenai kemiskinan dan variabel-variabel pendukung beserta kaitannya dengan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan sehingga Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan di masa datang.

Ungaran, Mei 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Semarang,



Dewi Trirahayuni

<https://semarangkab.bps.go.id>





DAFTAR ISI
Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023
Volume 4, 2024

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 TUJUAN	4
1.3 CAKUPAN WILAYAH	4
1.4 METODOLOGI	4
1.4.1 METODE PENGHITUNGAN	5
1.4.2 KONSEP DAN DEFINISI	7
BAB II PERKEMBANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG	13
2.1 PENDUDUK MISKIN	15
2.2 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN & INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	17
2.3 PENDIDIKAN	18
2.4 KETENAGAKERJAAN	21
2.5 PERUMAHAN	23
2.6 KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN PEREKONOMIAN.....	25
BAB III DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SEMARANG 2023.....	27
BAB IV PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	41

<https://semarangkab.bps.go.id>





DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Semarang (Rupiah), 2023.....	31
Tabel 3.2	Persentase Rata-Rata Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Semarang (Persen), 2023.....	32

<https://semarangkab.bps.go.id>

<https://semarangkab.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	15
Gambar 2.2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023.....	16
Gambar 2.3	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Semarang, 2015-2023.....	18
Gambar 2.4	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023.....	19
Gambar 2.5	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023.....	20
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang, 2015-2023.....	21
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal di Kabupaten Semarang, 2020-2023.....	22
Gambar 2.8	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023.....	23
Gambar 2.9	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023	24
Gambar 2.10	Indikator Makro Kabupaten Semarang, 2019-2023.....	25
Gambar 3.1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Semarang, 2019-2023.....	29
Gambar 3.2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Beberapa Kabupaten/ Kota, 2023.....	30

<https://semarangkab.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen), 2015-2023.....	43
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Ribu Orang), 2015-2023.....	44
Lampiran 3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2015-2023.....	45
Lampiran 4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2015-2023.....	46
Lampiran 5	Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Rupiah), 2015-2023.....	47
Lampiran 6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015 – 2023	48
Lampiran 7	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023.....	48
Lampiran 8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015 - 2023.....	49
Lampiran 9	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023.....	49
Lampiran 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Informal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015- 2023.....	50
Lampiran 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015- 2023.....	50
Lampiran 12	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Non Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023.....	51
Lampiran 13	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja (Persen), 2015-2023.....	51
Lampiran 14	Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023.....	52
Lampiran 15	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023	52
Lampiran 16	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023	52
Lampiran 17	Beberapa Indikator Makro Kabupaten Semarang, 2017-2023.....	53



Lampiran 18	Beberapa Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah, 2017-2023.....	53
Lampiran 19	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023.....	54
Lampiran 20	Distribusi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023.....	55

<https://semarangkab.bps.go.id>



PENDAHULUAN

TPT

**Tingkat Pengangguran
Terbuka**

▼ **4,05**



TPAK

**Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja**

▲ **76,07**



IPM

**Indeks Pembangunan
Manusia**

▲ **75,13**



P0

**Penduduk di Bawah
Garis Kemiskinan**

▼ **7,17**



<https://semarangkab.bps.go.id>





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


World Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya kesejahteraan yang terdiri dari berbagai komponen dimensi. Pendekatan terluas tentang kemiskinan adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Selanjutnya *World Bank* dan *UNDP (United Nations of Development Programme)* menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subyektif (Locatelli, 2009).

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi semua bangsa terutama bagi negara-negara berkembang. Hingga saat ini pemerintah telah menjalankan dan merealisasikan berbagai skema dan sistem untuk menekan laju kemiskinan. Hal ini dilakukan agar kestabilan pembangunan sebagai tujuan utama dapat tercapai.

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah berupaya mendorong perekonomian serta menjaga daya konsumsi masyarakat melalui banyak program. Dalam hal ini tentu saja kondisi perekonomian global dan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian secara langsung. Sehingga pada tahun 2020 situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat terdampak secara nyata.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kewenangan dan tugas untuk menyediakan data kemiskinan melakukan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara periodik. Penyediaan data kemiskinan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada Bulan Maret dan September. SUSENAS Maret untuk estimasi data kemiskinan hingga level kabupaten/kota sedangkan SUSENAS September untuk estimasi data kemiskinan hanya sampai pada level provinsi.

SUSENAS bukan hanya mencakup data kemiskinan namun merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan



pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

1.2 TUJUAN

Publikasi ini disusun agar memberikan data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan pembangunan.

1.3 CAKUPAN WILAYAH

Wilayah yang dicakup dalam publikasi ini adalah seluruh Kabupaten Semarang. Dimana jumlah sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat kemiskinan Kabupaten Semarang sebanyak 870 rumah tangga yang tersebar di 19 Kecamatan yang merupakan sampel SUSENAS Maret 2023.

1.4 METODOLOGI

Unit observasi yang dicakup dalam publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023 adalah rumah tangga sampel SUSENAS Maret 2023. Survei dilakukan dengan pendekatan rumah tangga pada wilayah kerja (blok sensus). Hasil estimasi SUSENAS Maret disajikan hingga tingkat kabupaten/kota.

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang lebih representatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan stratifikasi menurut urban/rural pada seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2010. *Implicit stratification* rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.



1.4.1 METODE PENGHITUNGAN

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Langkah pertama adalah menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat kabupaten/kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GK_{ij}^{t-1} \times (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana :

GKS_{ij}^t = Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t*

GK_{ij}^{t-1} = Garis Kemiskinan kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t-1*

E_j = Elastisitas provinsi ke-*j* (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-*j* terhadap inflasi provinsi ke-*j*)

I_{ij} = Inflasi kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j*

Catatan :

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-*i* digunakan elastisitas provinsi ke-*j* di level perdesaan.
- Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-*i* digunakan elastisitas provinsi ke-*j* di level perkotaan.
- Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*)

Langkah selanjutnya adalah menentukan persentase penduduk miskin (P_o) sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* yaitu dengan cara mengalihkan pertumbuhan P_o provinsi ke-*j* periode *t* ke *t-1* dengan P_o kabupaten ke-*i* pada tahun *t-1*. Langkah berikutnya adalah menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P_o sementara. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.



y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

1.4.2 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi mencakup pengertian, batasan serta cakupan yang ingin dibahas dalam Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023.

1.4.2.1 KEMISKINAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (*World Bank*, 2006). Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (UU No. 24 Th 2004).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi seseorang yang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan atau dikenal sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Nugroho dan Dahuri, 2012).

- Kemiskinan absolut menyatakan seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kelebihan konsep kemiskinan absolut adalah bisa dibandingkan antarwaktu dan antardaerah, dengan catatan definisi kemiskinan tidak mengalami perubahan.

- Kemiskinan relatif menyatakan seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam hal ini garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antardaerah dan antarwaktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun, untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif dapat digunakan.

Indikator yang sering disorot oleh pemerintah daerah adalah P0. P0 didefinisikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.


1.4.2.2 PENDIDIKAN

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan tingkat pendidikan penduduk miskin menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

1.4.2.3 KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.



Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.


Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan). Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu seminggu yang lalu. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih mencari pekerjaan. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Yang digolongkan mencari pekerjaan antara lain: seseorang yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain; seseorang yang sedang dibebastugaskan dari pekerjaan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain; seseorang yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; seseorang yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan



dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; seseorang yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan jumlah penduduk pengangguran terhadap penduduk yang aktif secara ekonomi atau penduduk angkatan kerja.

1.4.2.4 FASILITAS PERUMAHAN

Air terlindung adalah leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter.


Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak *sustain* (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi, cuci, dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

1.4.2.5 PROGRAM PEMERINTAH

Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Raskin). Program Raskin (sebelumnya disebut program Beras Miskin/Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KSPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.





Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur. Bahan pangan dalam program BPNT ini berbentuk beras dan/atau telur.


1.4.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Indeks harapan hidup diwakili ukuran yang disebut Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Indeks pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan indeks standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam pendataan Susenas, HLS dikoreksi dengan



siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

1.4.2.7 PERTUMBUHAN EKONOMI

Selain itu konsep yang akan digunakan dalam publikasi ini adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). LPE adalah laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada suatu wilayah pada tahun tertentu. LPE menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.

<https://simpananab.bps.go.id>

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023



Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada Maret 2023 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah.





<https://semarangkab.bps.go.id>

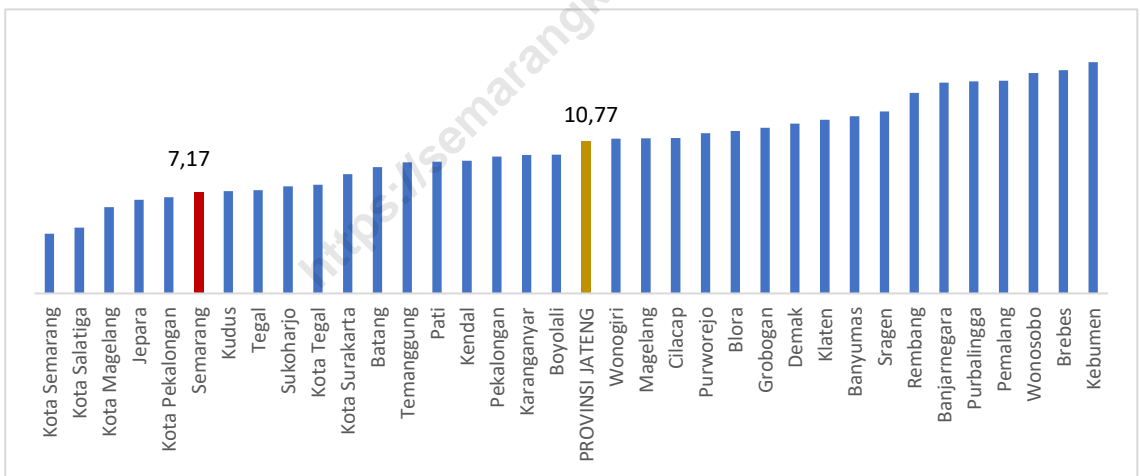


BAB II

PERKEMBANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEMARANG

2.1 PENDUDUK MISKIN

Persoalan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya tingkat penganggaran atau kekayaan sumber daya alam semata, namun merupakan kajian multidimensi yang memerlukan pencermatan mendalam. Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada tahun 2023 menempati urutan ke-6 (enam) terkecil jika disandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sebesar 7,17 persen ini lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 10,77 persen pada tahun 2023.

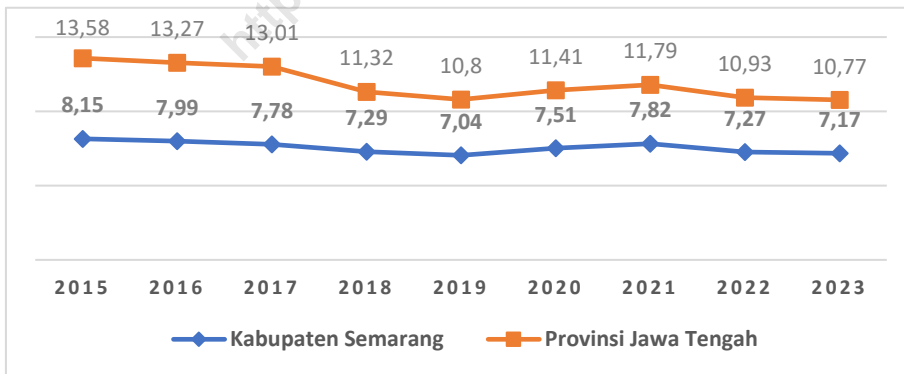


Gambar 2.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,10 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,27 persen di tahun 2022 menjadi 7,17 persen di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pandemi Covid-19 yang secara global telah melandai dan menuju ke kondisi endemik sehingga perekonomian secara nasional kembali membaik dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.


Persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang sebesar 7,17 persen ini setara dengan 78,35 ribu penduduk miskin. Artinya, pada tahun 2023 masih terdapat 78,35 ribu penduduk dengan kategori miskin, meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang telah berkurang sekitar 250 orang.

Gambar 2 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah mengalami kecenderungan menurun. Namun di tahun 2020 dan 2021 baik Kabupaten Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan pada persentase dan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya aktivitas dan pergerakan penduduk yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut memberikan tekanan ekonomi hingga pada penduduk di tingkat bawah. Pada tahun 2022 hingga 2023, seiring dengan penguatan ekonomi dan pandemi yang semakin melandai, angka kemiskinan mengalami penurunan secara simultan baik di Kabupaten Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2015-2023

Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang mengalami penurunan 0,1 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 0,16 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan oleh tingkat pengendalian inflasi yang terjaga, peningkatan nilai tukar



petani, serta bantuan sosial pemerintah yang tepat waktu. Dalam melihat kondisi kemiskinan, perlu ditelaah juga nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran minimal seorang individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan batas seseorang dikatakan miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Semarang pada tahun 2023 tercatat sebesar 498.952 rupiah/kapita/bulan yang berarti bahwa seseorang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan tersebut akan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Perlu diingat bahwa nilai ini adalah untuk satu individu (per kapita). Sehingga jika dalam satu rumah tangga terdiri dari lima orang maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari 5 x Rp 498.952,- atau sebesar Rp 2.494.760,- pada setiap bulan.

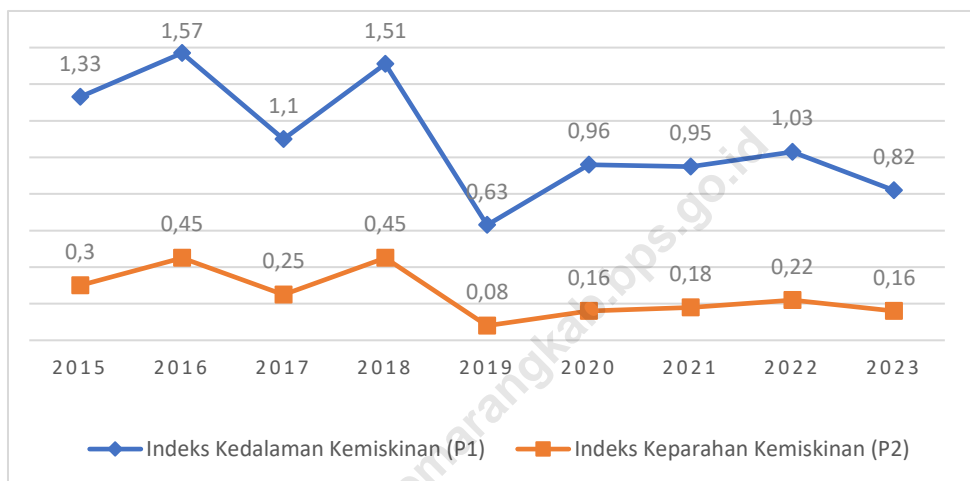
Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2018 Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang tercatat selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Namun, sejak tahun 2019 hingga 2023 nilai garis kemiskinan di Kabupaten Semarang lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

2.2 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan kabar baik bagi para pemangku kebijakan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Semarang bergeser ke arah yang lebih baik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2023 sebesar 0,82, lebih rendah dari pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,03. Angka ini mengandung arti bahwa pendapatan kelompok masyarakat miskin semakin tinggi sehingga berdampak kepada peningkatan daya beli. Kondisi perekonomian Kabupaten Semarang pasca pandemi Covid-19 yang mulai membaik berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tidak terkecuali juga pada masyarakat miskin.

Sejalan dengan hal di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2023 juga mengecil, dimana pada tahun 2022 sebesar 0,22 menjadi 0,16 di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat telah berdampak luas hingga pada level penduduk miskin. Baik karena kondisi perekonomian secara umum yang membaik, juga didukung dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah.



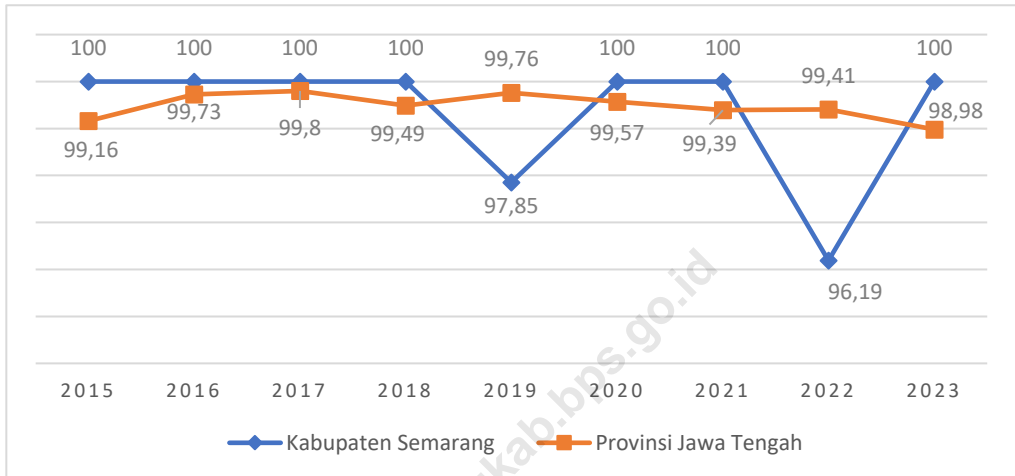
Gambar 2.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Semarang, 2015-2023

Membbaiknya kedua indikator kemiskinan tersebut tentunya merupakan hasil nyata dari adanya campur tangan pemerintah dalam program kesehatan, perumahan, investasi, penyediaan pupuk, serta pembangunan dari pemerintah daerah secara umum hingga meningkatnya anggaran desa untuk kemiskinan. Namun demikian, pemerintah masih tetap memerlukan upaya untuk mengentaskan penduduk miskin dengan skema lebih intensif.

2.3 PENDIDIKAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menyangkut berbagai hal diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya. Dimana kondisi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023, angka partisipasi sekolah penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang

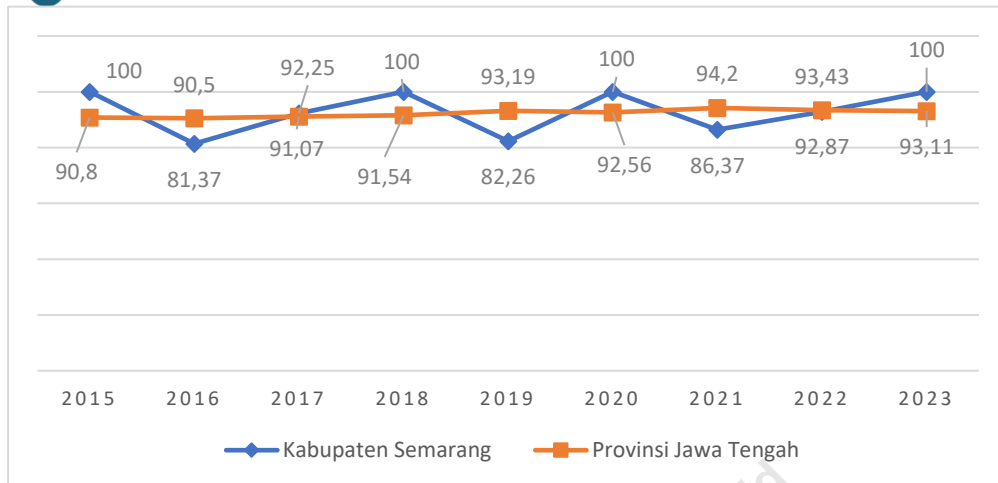
selama periode 2015 hingga 2023 hampir selalu berada pada angka 100 kecuali pada tahun 2019 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk miskin usia Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang telah masuk pendidikan di jenjang formal, baik SD/MI bahkan SMP/MTS.



Gambar 2.4. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 13-15 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Semarang mencapai 100 persen. Artinya bahwa seluruh penduduk miskin usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sudah bersekolah semua.

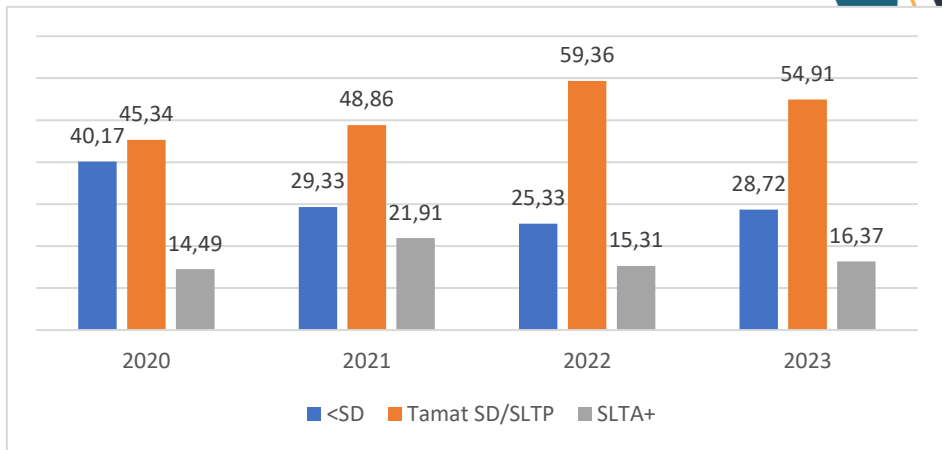
Program-program unggulan pemerintah seperti Kartu Serasi Pintar, pembebasan biaya paket A/B/C, layanan transportasi pendidikan, bantuan layanan internet untuk sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Semarang perlu dipertahankan untuk meningkatkan capaian indikator pendidikan di Kabupaten Semarang.



Gambar 2.5. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023

Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan tentunya karena dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta kemudahan akses ke fasilitas tersebut. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2021 tercatat seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang telah memiliki fasilitas SD/ sederajat. Sementara desa/kelurahan yang memiliki fasilitas setingkat SMP/ sederajat sebanyak 107 desa/kelurahan, dan desa/kelurahan yang memiliki fasilitas setingkat SMA/ sederajat sebanyak 35 desa/kelurahan.

Menurut data yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Semarang tahun 2023 untuk beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut, SD sebanyak 451 sekolah, MI sebanyak 50 sekolah, SMP sebanyak 52 sekolah, MTS sebanyak 49 sekolah, SMA sebanyak 26 sekolah, MA sebanyak 11 sekolah serta SMK sebanyak 43 sekolah.



Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang, 2020-2023

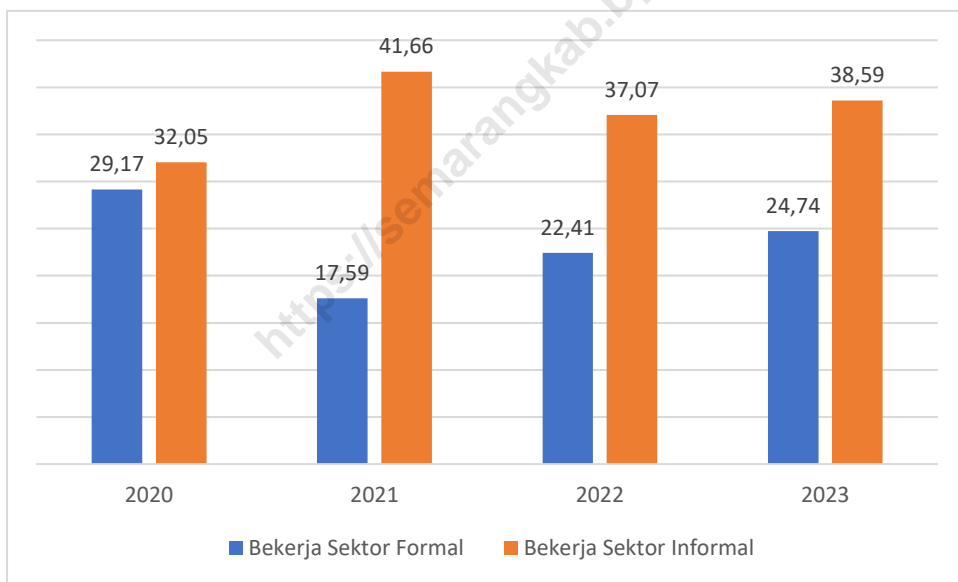
Berdasarkan Gambar 2.6 terlihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Semarang didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/SLTP. Penduduk dengan pendidikan SD/SLTP tentunya akan kalah bersaing dalam meraih kesempatan kerja untuk mendapatkan upah tinggi. Peluang untuk terlibat sebagai pekerja formal juga relatif lebih kecil. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah mahalannya fasilitas pendidikan dan belum meratanya pelayanan publik di suatu wilayah membuat pendidikan masih terbilang eksklusif. Masih banyak ditemukan rumah tangga miskin terjebak dalam *Poverty Trap*, yaitu kemiskinan membawa dampak dimana anak yang terlahir dari keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hidup dalam lilitan kemiskinan mendorong mereka untuk memilih bekerja dibandingkan mengenyam pendidikan lebih lama sehingga produktivitasnya rendah karena cenderung bekerja di sektor yang berpenghasilan rendah. Kemudian anak dari keluarga miskin akan bertahan hidup dan berkembang menjadi orang dewasa miskin yang selanjutnya akan mentransfer kemiskinan kepada anak-anaknya dimasa mendatang saat menjadi orang tua (Chzhen et al., 2017).

2.4 KETENAGAKERJAAN

Dalam melakukan analisis kemiskinan, sangat penting dalam melihat dari sisi karakteristik ketenagakerjaannya. Berdasarkan Gambar 2.7, penduduk miskin di Kabupaten Semarang tahun 2023 yang berstatus tidak bekerja terdapat sebesar 36,66 persen. Artinya lebih dari sepertiga penduduk miskin di Kabupaten Semarang tidak

bekerja. Sedangkan jika dilihat dari jenis pekerjaannya mereka yang bekerja dan berstatus miskin didominasi penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian. Hasil ini tentunya berbeda dengan pendapat secara umum yang menyatakan bahwa penduduk miskin didominasi mereka yang bekerja pada sektor pertanian.

Jika melihat tren dan pola yang terjadi, selama tiga tahun terakhir sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Semarang bekerja di sektor informal. Sektor informal yang dimaksud adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pada tahun 2023, penduduk miskin yang bekerja di sektor informal tercatat sebesar 38,59 persen. Lebih besar dibandingkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal yakni sebesar 24,74 persen.



Gambar 2.7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal di Kabupaten Semarang, 2020-2023

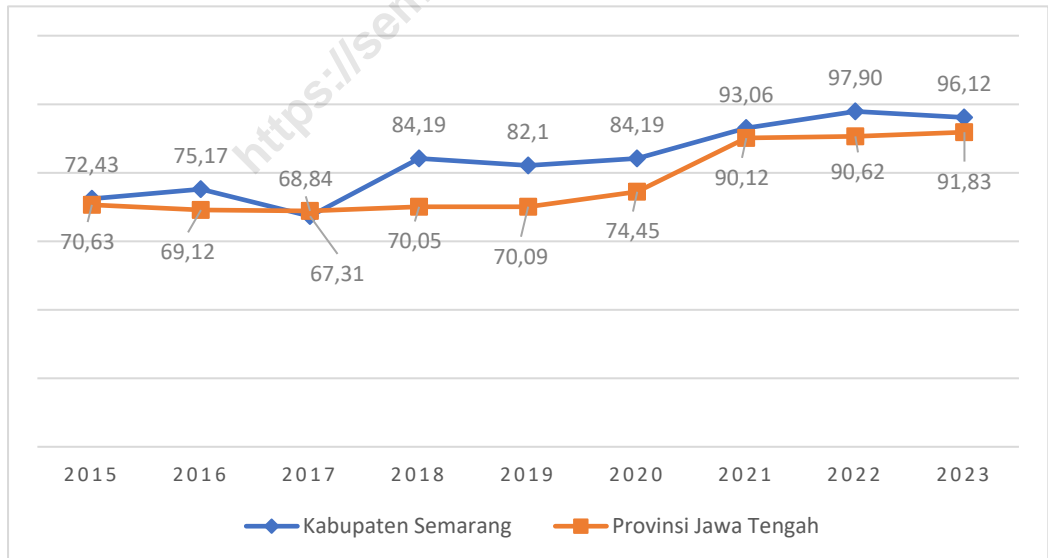
Sektor informal dapat berfungsi sebagai "safety belt", yang menopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya. Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, sehingga mengurangi pengangguran. Namun sayangnya, sektor informal dikenal dengan kondisi kerja yang tidak layak, tingkat pendapatan rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berisiko tinggi serta tingkat keamanan dan perlindungan

22 | Analisis Kemiskinan Kabupaten Semarang 2023

kerja yang rendah. Kebanyakan sektor informal tidak terorganisir, tidak teratur, tidak terdaftar dan cenderung berskala kecil. Pekerja di sektor ini umumnya berkeahlian rendah sehingga hanya mampu menggunakan teknologi yang sederhana. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat upah/pendapatan. Sehingga kemiskinan dan pekerja informal merupakan dua faktor yang saling terkait dan saling berpengaruh.

2.5 PERUMAHAN

Pada kategori perumahan, informasi yang dapat memperkaya analisis pada publikasi ini adalah penggunaan air layak serta penggunaan tempat buang air besar atau jamban. Pada Gambar 2.8 di bawah menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk miskin di Kabupaten Semarang sudah menggunakan air layak untuk keperluan sehari-hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penggunaan air layak pada penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

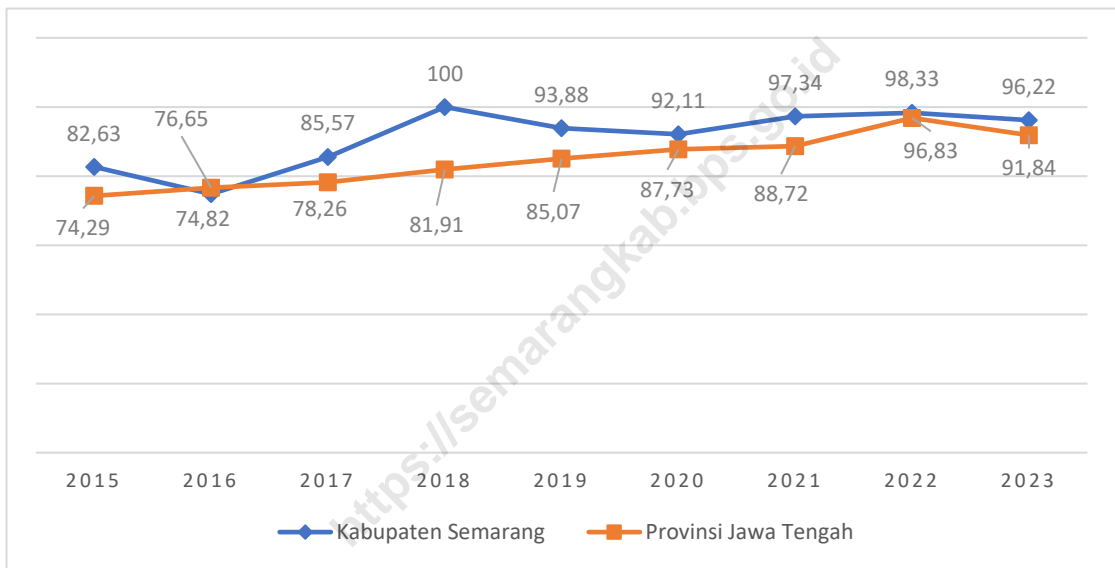


Gambar 2.8. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023

Tren penggunaan air layak terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Ini terjadi di Kabupaten Semarang maupun secara umum di Provinsi Jawa

Tengah. Pada tahun 2023 penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Kabupaten Semarang sudah tercatat mencapai 96,12 persen.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan penggunaan jamban untuk buang air besar, pada tahun 2023 tercatat sebesar 96,22 persen penduduk miskin di Kabupaten Semarang menggunakan jamban sendiri/bersama. Dimana jika dibandingkan dengan keadaan rata-rata Jawa Tengah maka secara umum kondisi di Kabupaten Semarang memiliki capaian yang lebih tinggi dan lebih baik.



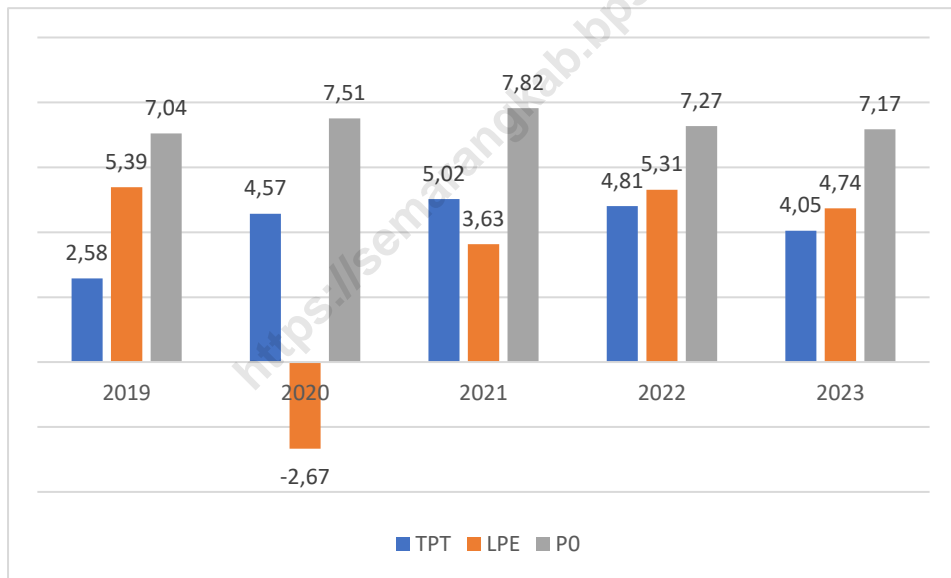
Gambar 2.9. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023

Pengukuran indikator dan gambaran terkait kesehatan dan perumahan penting untuk dilakukan. Suatu negara yang sehat berawal dari diri sendiri dan keluarga yang sehat juga. Salah satunya adalah dengan adanya program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Akses pada sanitasi khususnya pada penggunaan jamban sehat, saat ini memang masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Masih tingginya angka buang air besar di sembarang tempat atau *open defecation*, menjadi salah satu indikator yang menunjukkan rendahnya akses masyarakat pada fasilitas buang air besar. Kondisi ini dapat mengakibatkan pencemaran penyakit yang berakibat pada menurunnya kondisi kesehatan suatu keluarga. Penggunaan jamban yang sehat perlu dipantau dan dituntaskan pada

seluruh penduduk. Demikian juga untuk penggunaan air layak. Keduanya menjadi target pada pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan dituntaskan oleh seluruh negara di dunia.


2.6 KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN PEREKONOMIAN

Dalam berbagai kesempatan, kondisi kemiskinan seringkali dikaitkan dengan berbagai indikator makro lainnya, diantaranya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif dalam melihat kondisi suatu wilayah.



Gambar 2.10. Indikator Makro Kabupaten Semarang, 2019-2023

Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2023 perlahan mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif, dan pada tahun 2023 perekonomian tumbuh mencapai 4,74 persen. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tren positif, angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 4,81 persen pada tahun 2022 menjadi 4,05 persen pada tahun 2023. Secara simultan, angka kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 juga mengalami penurunan yaitu menjadi 7,17



persen dari yang sebelumnya 7,27 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Semarang yang secara umum ditopang oleh sektor industri pengolahan, pariwisata dan pertanian mulai mengalami perbaikan dan peningkatan. Kondisi perekonomian yang membaik membuka peluang bertambahnya kesempatan kerja, dan tentunya secara tidak langsung mendorong peningkatan kemampuan belanja penduduk miskin, baik kebutuhan pangan maupun non pangan. Sehingga jika kebutuhan pokok tersebut mampu terpenuhi, maka akan semakin mudah bagi penduduk tersebut terlepas dari jurang kemiskinan.

Memang bukan hal instan untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan secara adil dan merata, sehingga kemiskinan di Kabupaten Semarang setiap tahunnya semakin berkurang dan semua masyarakat sejahtera.

<https://semarangkab.go.id>

DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG 2023

Makanan



20% Teratas
1.244.503



40% Tengah
654.357



40% Terbawah
343.103

Non Makanan



20% Teratas
1.881.726



40% Tengah
546.239



40% Terbawah
251.887



<https://semarangkab.bps.go.id>

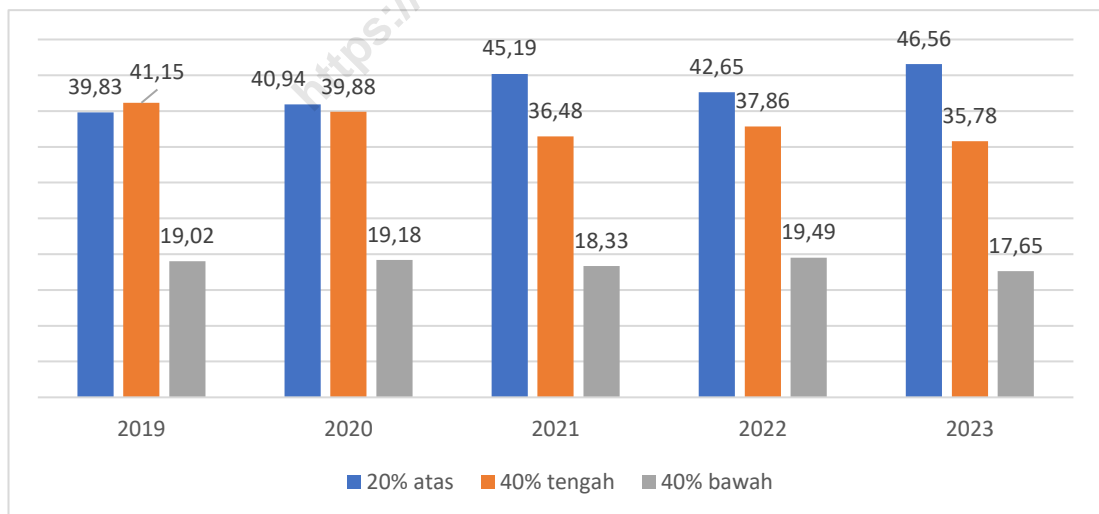


BAB III

DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG 2023 BERDASARKAN KRITERIA BANK DUNIA

World Bank (2006) membagi penduduk menjadi tiga kelompok distribusi pengeluaran per kapita yaitu 20% penduduk dengan pengeluaran teratas, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah dan 40% penduduk dengan pengeluaran terendah.

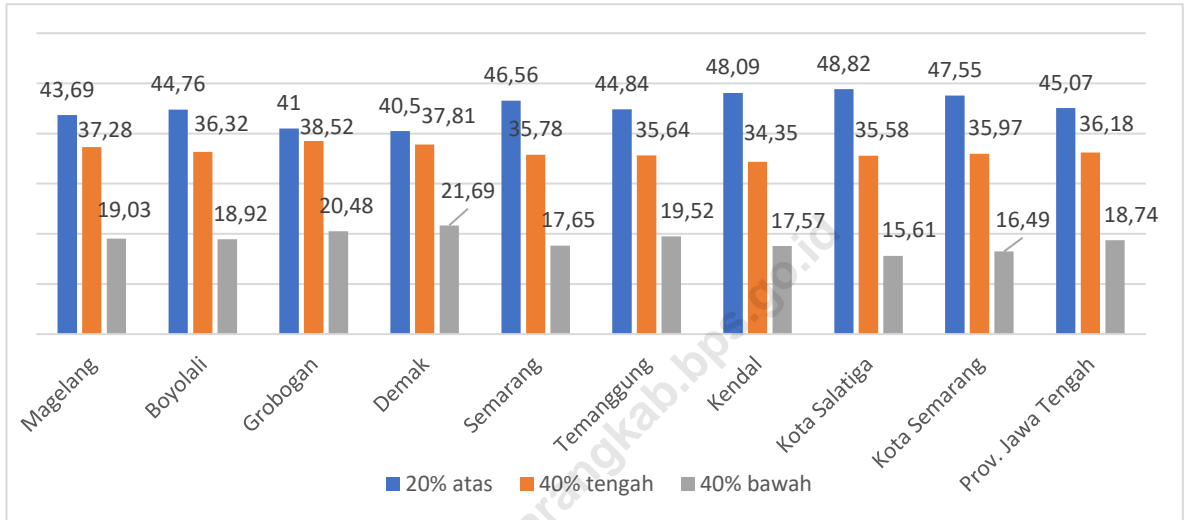
Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12 persen. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*) terjadi jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di atas 17 persen.



Gambar 3.1. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Semarang, 2019-2023

Menurut Gambar 3.1 selama kurun waktu 2019 hingga 2023 ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Semarang berada pada kategori *low inequality*.

Pada tahun 2023 pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah sebesar 17,65 persen. Perlu kewaspadaan dari para pemangku kebijakan karena level ketimpangan pengeluaran tahun 2023 di Kabupaten Semarang mendekati kategori ketimpangan sedang (*moderate inequality*).



Gambar 3.2. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Beberapa Kabupaten/Kota, 2023

Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Semarang, ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Semarang masih cukup baik. Level ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Semarang sama dengan Jawa Tengah yaitu berada pada level ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*). Kota Salatiga dan Kota Semarang yang merupakan wilayah dengan bercirikan kota besar berada pada level ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*) dimana pengeluaran pada penduduk 40% terbawah berada pada rentang 12-17 persen.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan secara lebih mikro lagi yaitu dalam rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Atau dengan kata lain proporsi pengeluaran konsumsi makanan dapat digunakan sebagai proksi atau pendekatan kesejahteraan.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan suatu rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1,1 juta rupiah. Artinya setiap penduduk di Kabupaten Semarang secara rata-rata membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan sebulan setara 1,1 juta rupiah. Jika dalam satu rumah tangga ada 4 orang, maka rata-rata pengeluaran rumah tangga dalam sebulan sebesar 4,4 juta rupiah.

Dari 1,1 juta rupiah tersebut, dibagi menjadi 2 komoditas besar yakni makanan dan non makanan. Untuk tahun 2023, pengeluaran makanan per kapita dalam sebulan secara rata-rata adalah 648 ribu rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan per kapita dalam sebulan sebesar 696 ribu rupiah.

Tabel 3.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Semarang (Rupiah), 2023

Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	343.103	654.357	1.244.503	648.385
Non Makanan	251.887	546.239	1.881.726	696.288
Pengeluaran	594.990	1.200.597	3.126.230	1.344.674

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2023

Selanjutnya jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran yang diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita sebulan akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni penduduk yang berada di 40 persen penduduk terbawah, 40 persen penduduk menengah, dan 20 persen penduduk dengan pengeluaran per kapita teratas. Dari tabel di atas terlihat bahwa semakin tinggi kelompok pengeluaran maka semakin besar pula proporsi pengeluaran makanannya. Adapun persentasenya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Persentase Rata-Rata Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Semarang (persen), 2023

Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	57,67	54,50	39,81	48,22
Non Makanan	42,33	45,50	60,19	51,78
Pengeluaran	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2023

Dilihat dari tabel di atas, bahwa persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok pengeluaran yang semakin tinggi akan memperbesar persentase pengeluaran komoditas non makanan. Terlihat pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas tercatat mencapai 60,19 persen. Sedangkan secara rata-rata seluruh penduduk, pengeluaran per kapita komoditas non makanan sebesar 51,78 persen.

Kondisi ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa penduduk di Kabupaten Semarang secara umum atau rata-rata berada pada tingkat kesejahteraan yang baik. Mengingat di negara berkembang pengeluaran penduduk rata-rata didominasi oleh pengeluaran komoditas makanan.

Namun demikian, jika diperhatikan pada dua kelompok lainnya, persentase pengeluaran komoditas makanan masih mendominasi (di atas 50 persen).

PENUTUP

INDEK KEDALAMAN
KEMISKINAN (P1)

0,82



INDEKS KEPARAHAN
KEMISKINAN (P2)

0,16



GARIS KEMISKINAN (GK)
(RUPIAH)

498.952



JUMLAH PENDUDUK
MISKIN (ORANG)

78.350





<https://semarangkab.bps.go.id>



BAB IV

PENUTUP

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar 0,01 persen poin merupakan wujud keberhasilan dari berbagai sektor pembangunan. Di tengah tekanan laju pertumbuhan ekonomi pada 4,74 persen poin dan penurunan tingkat pengangguran pada 4,05 persen poin, kinerja pengendalian kemiskinan tetap menunjukkan upaya optimal.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di beberapa Kabupaten/kota lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini dibuktikan lebih kecilnya persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin provinsi Jawa Tengah.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin Kabupaten Semarang pada tahun 2023 secara umum juga mengalami kenaikan. Dalam komposisi pengeluaran makanan dan non makanan juga mendekati seimbang. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan rumah tangga.

Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara simultan yang menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK) dan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin merata.

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan ini harus tetap dilanjutkan dengan memperhatikan Pembangunan dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, pemerintahan dan sosial budaya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bersama yang merata dan berkelanjutan.



<https://semarangkab.bps.go.id>





DAFTAR PUSTAKA

<https://semarangab.bps.go.id>



<https://semarangkab.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral: Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kedepatian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas.
- BPS. (2023). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023*. (N. Sahrizal, N. Taufiq, & Masfufah, Eds.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2023*. Ungaran: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Hasbullah, J. (2012). *Tangguh Dengan Statistik: Akurat Dalam Membaca Realitas Dunia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank
- <https://jateng.bps.go.id/>
- <https://semarangkab.bps.go.id/>



<https://semarangkab.bps.go.id>



A central graphic featuring a large yellow circle with a black outline. A pink banner with the word "LAMPIRAN" in white, bold, uppercase letters is positioned across the upper part of the circle. Below it is a blue banner. The graphic is surrounded by several small colored dots (pink, blue, yellow) and curved lines in blue and yellow, creating a dynamic, celebratory feel.

LAMPIRAN





<https://semarangkab.bps.go.id>



Lampiran 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	14,39	14,12	13,94	11,25	10,73	11,46	11,67	11,02	10,99
Banyumas	17,52	17,23	17,05	13,50	12,53	13,26	13,66	12,84	12,53
Purbalingga	19,70	18,98	18,80	15,62	15,03	15,90	16,24	15,30	14,99
Banjarnegara	18,37	17,46	17,21	15,46	14,76	15,64	16,23	15,20	14,90
Kebumen	20,44	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34
Purworejo	14,27	13,91	13,81	11,67	11,45	11,78	12,40	11,53	11,33
Wonosobo	21,45	20,53	20,32	17,58	16,63	17,36	17,67	16,17	15,58
Magelang	13,07	12,67	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96
Boyolali	12,45	12,09	11,96	10,04	9,53	10,18	10,62	9,82	9,81
Klaten	14,89	14,46	14,15	12,96	12,28	12,89	13,49	12,33	12,28
Sukoharjo	9,26	9,07	8,75	7,41	7,14	7,68	8,23	7,61	7,58
Wonogiri	12,98	13,12	12,90	10,75	10,25	10,86	11,55	10,99	10,94
Karanganyar	12,46	12,49	12,28	10,01	9,55	10,28	10,68	9,85	9,79
Sragen	14,86	14,38	14,02	13,12	12,79	13,38	13,83	12,94	12,87
Grobogan	13,68	13,57	13,27	12,31	11,77	12,46	12,74	11,80	11,72
Blora	13,52	13,33	13,04	11,90	11,32	11,96	12,39	11,53	11,49
Rembang	19,28	18,54	18,35	15,41	14,95	15,60	15,80	14,65	14,17
Pati	11,95	11,65	11,38	9,90	9,46	10,08	10,21	9,33	9,31
Kudus	7,73	7,65	7,59	6,98	6,68	7,31	7,60	7,41	7,24
Jepara	8,50	8,35	8,12	7,00	6,66	7,17	7,44	6,88	6,61
Demak	14,44	14,1	13,41	12,54	11,86	12,54	12,92	12,09	12,01
Semarang	8,15	7,99	7,78	7,29	7,04	7,51	7,82	7,27	7,17
Temanggung	11,76	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	9,26
Kendal	11,62	11,37	11,1	9,84	9,41	9,99	10,24	9,48	9,39
Batang	11,27	12,90	12,61	10,06	8,35	9,13	9,68	8,98	8,92
Pekalongan	12,84	12,90	12,61	10,06	9,71	10,19	10,57	9,67	9,67
Pemalang	18,30	17,58	17,37	16,04	15,41	16,02	16,56	15,06	15,03
Tegal	10,09	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14	8,60	7,90	7,30
Brebes	19,79	19,47	19,14	17,17	16,22	17,03	17,43	16,05	15,78
Kota Magelang	9,05	8,79	8,75	7,87	7,46	7,58	7,75	7,10	6,11
Kota Surakarta	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40	8,84	8,44
Kota Salatiga	5,8	5,24	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14	4,73	4,66
Kota Semarang	4,97	4,85	4,62	4,14	3,98	4,34	4,56	4,25	4,23
Kota Pekalongan	8,09	7,92	7,47	6,75	6,60	7,17	7,59	7,00	6,81
Kota Tegal	8,26	8,20	8,11	7,81	7,47	7,80	8,12	7,91	7,68
Jawa Tengah	13,58	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Ribu Orang), 2015-2023

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	243,47	240,20	238,30	193,18	185,18	198,60	201,71	190,96	191,00
Banyumas	285,85	283,90	283,20	226,23	211,65	225,84	232,91	220,47	216,50
Purbalingga	176,49	171,80	171,90	144,16	140,07	149,48	153,08	145,33	143,41
Banjarnegara	165,36	158,20	156,80	141,72	136,10	144,95	150,19	141,25	138,99
Kebumen	241,94	235,90	233,40	208,66	201,34	211,09	212,92	196,16	195,45
Purworejo	101,25	99,10	98,60	83,55	82,17	84,79	88,80	82,64	81,28
Wonosobo	166,41	160,10	159,20	138,32	131,35	137,64	139,67	128,11	123,70
Magelang	162,38	158,90	157,20	143,44	137,45	146,34	154,91	145,33	144,49
Boyolali	119,97	117,00	116,40	98,23	93,75	100,59	104,82	97,18	97,48
Klaten	172,30	168,00	165,00	151,73	144,14	151,83	158,23	144,87	144,43
Sukoharjo	79,94	78,90	76,70	65,43	63,55	68,89	73,84	68,72	68,79
Wonogiri	122,98	124,80	123,00	102,84	98,28	104,37	110,46	105,19	104,82
Karanganyar	106,43	107,70	106,80	87,79	84,46	91,72	95,41	88,56	88,64
Sragen	130,42	126,80	124,00	116,37	113,83	119,38	122,91	115,14	114,62
Grobogan	184,49	184,10	181,00	168,70	161,92	172,26	175,72	163,20	162,52
Blora	115,05	113,90	111,90	102,50	97,86	103,73	107,05	99,83	99,61
Rembang	119,11	115,50	115,20	97,44	95,26	100,08	101,40	94,56	91,97
Pati	147,05	144,20	141,70	123,94	118,98	127,37	128,74	118,04	118,18
Kudus	64,10	64,20	64,40	59,99	58,00	64,24	67,06	66,06	65,16
Jepara	100,61	100,30	99,00	86,54	83,47	91,14	95,22	89,08	86,75
Demak	160,89	158,80	152,60	144,12	137,60	146,87	151,74	143,01	143,26
Semarang	81,25	80,72	79,66	75,67	73,90	79,88	83,61	78,60	78,35
Temanggung	87,45	87,10	86,80	75,39	72,57	77,33	79,09	73,04	72,96
Kendal	109,27	107,80	106,10	94,70	91,20	97,49	100,00	93,03	92,64
Batang	83,53	82,60	81,50	66,08	64,07	70,57	74,91	69,94	69,97
Pekalongan	112,07	113,30	111,60	89,54	87,01	91,86	95,26	87,53	87,93
Pemalang	235,53	227,10	225,00	208,34	200,67	209,03	215,08	195,84	195,57
Tegal	143,54	144,20	141,80	114,06	109,94	117,50	123,52	113,62	105,03
Brebes	352,01	348,00	343,50	309,17	293,18	308,78	314,95	290,66	286,14
Kota Magelang	10,92	10,60	10,60	9,59	9,10	9,27	9,44	8,65	7,45
Kota Surakarta	55,71	55,90	54,90	46,99	45,18	47,03	48,79	45,94	43,89
Kota Salatiga	10,62	9,70	9,60	9,24	9,21	9,69	10,14	9,45	9,41
Kota Semarang	84,27	83,60	80,90	73,65	71,97	79,58	84,45	79,87	80,53
Kota Pekalongan	24,06	23,70	22,50	20,52	20,21	22,16	23,49	21,81	21,36
Kota Tegal	20,31	20,30	20,10	19,44	18,64	19,55	20,27	19,78	19,22
Jawa Tengah	4.557,04	4.506,9	4.450,7	3.897,2	3.743,23	3.980,9	4.109,75	3.831,44	3.791,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2015-2023

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	2,71	2,58	1,98	1,87	1,28	0,95	1,48	1,47	1,54
Banyumas	2,91	3,08	3,19	2,60	2,52	2,25	2,35	1,75	1,78
Purbalingga	3,37	3,85	2,79	2,79	2,24	2,32	2,10	2,08	2,52
Banjarnegara	3,51	3,03	3,25	2,08	2,38	2,47	2,97	2,34	2,34
Kebumen	4,08	3,78	3,62	2,48	2,58	2,62	3,24	3,41	2,89
Purworejo	2,43	2,67	2,25	1,67	0,84	0,98	1,36	1,31	1,78
Wonosobo	4,74	4,02	3,85	3,25	2,44	2,43	2,75	3,18	2,60
Magelang	1,60	1,84	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73
Boyolali	2,01	2,56	1,96	1,26	1,02	1,30	1,76	1,13	1,02
Klaten	2,72	2,70	2,46	1,72	1,46	1,66	1,79	1,86	1,70
Sukoharjo	1,09	1,36	0,93	0,97	0,87	0,97	0,91	0,87	1,17
Wonogiri	2,10	1,68	1,80	1,71	0,82	1,08	1,57	1,33	1,32
Karanganyar	1,82	2,09	1,85	1,70	1,45	1,56	1,61	1,64	1,22
Sragen	2,69	2,92	1,93	2,31	2,31	2,18	2,39	2,07	2,15
Grobogan	2,56	1,78	2,03	1,67	0,90	1,17	1,66	1,95	1,48
Blora	2,08	2,17	1,53	1,62	1,59	1,39	1,82	1,80	1,35
Rembang	3,47	3,28	3,24	2,86	2,32	2,44	2,77	2,41	2,52
Pati	2,02	1,99	1,44	1,37	1,47	1,37	1,69	1,20	1,64
Kudus	0,90	1,07	1,00	0,88	0,83	1,01	1,23	0,90	0,99
Jepara	1,28	0,68	0,98	0,71	0,64	0,60	0,88	1,22	1,01
Demak	2,32	2,20	2,20	2,09	1,61	1,97	2,31	1,68	1,83
Semarang	1,33	1,57	1,10	1,51	0,63	0,96	0,95	1,03	0,82
Temanggung	1,99	1,70	1,81	1,36	0,51	0,86	1,57	1,06	0,99
Kendal	2,17	2,13	1,69	1,85	1,47	1,37	1,51	1,52	1,19
Batang	1,80	1,65	1,51	1,08	0,69	1,43	1,76	1,26	1,85
Pekalongan	1,98	1,94	1,73	1,40	1,17	1,42	1,75	1,67	1,30
Pemalang	3,93	3,04	3,52	2,96	2,55	2,86	2,92	2,43	2,40
Tegal	1,50	1,03	1,27	1,41	0,64	1,08	1,00	0,95	0,88
Brebes	3,52	3,96	3,06	3,51	2,31	3,01	3,04	2,73	2,98
Kota Magelang	1,39	1,20	1,30	1,07	0,99	1,12	0,85	0,47	0,74
Kota Surakarta	1,74	1,34	1,87	1,47	1,60	1,51	1,83	1,07	1,00
Kota Salatiga	1,07	0,60	0,85	0,69	0,83	0,53	0,80	0,66	0,75
Kota Semarang	0,50	0,76	0,54	0,58	0,57	0,68	0,67	0,56	0,54
Kota Pekalongan	0,83	0,80	0,92	1,01	0,92	1,28	1,51	0,90	0,82
Kota Tegal	1,34	1,04	1,42	1,23	1,15	1,38	1,04	1,15	0,86
Jawa Tengah	2,44	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 4. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2015-2023

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	0,76	0,70	0,42	0,44	0,21	0,13	0,30	0,33	0,35
Banyumas	0,71	0,85	0,85	0,70	0,67	0,50	0,57	0,35	0,41
Purbalingga	0,85	1,20	0,68	0,74	0,47	0,44	0,41	0,48	0,58
Banjarnegara	0,93	0,80	0,84	0,45	0,55	0,51	0,79	0,48	0,56
Kebumen	1,19	1,11	0,99	0,55	0,65	0,55	0,88	1,02	0,75
Purworejo	0,63	0,76	0,54	0,36	0,10	0,12	0,28	0,24	0,43
Wonosobo	1,60	1,11	1,10	0,78	0,46	0,47	0,65	0,86	0,63
Magelang	0,32	0,44	0,31	0,34	0,17	0,20	0,35	0,41	0,41
Boyolali	0,50	0,81	0,53	0,25	0,14	0,23	0,38	0,20	0,18
Klaten	0,72	0,71	0,61	0,38	0,27	0,31	0,38	0,44	0,38
Sukoharjo	0,25	0,29	0,17	0,17	0,14	0,21	0,21	0,14	0,31
Wonogiri	0,50	0,38	0,43	0,41	0,11	0,18	0,34	0,29	0,25
Karanganyar	0,40	0,51	0,43	0,43	0,35	0,33	0,37	0,37	0,24
Sragen	0,76	0,99	0,42	0,59	0,59	0,53	0,60	0,47	0,54
Grobogan	0,65	0,38	0,56	0,35	0,13	0,18	0,37	0,45	0,28
Blora	0,54	0,54	0,31	0,37	0,34	0,21	0,40	0,42	0,25
Rembang	0,99	0,85	0,89	0,78	0,48	0,53	0,68	0,59	0,73
Pati	0,55	0,49	0,35	0,29	0,31	0,26	0,42	0,25	0,42
Kudus	0,17	0,21	0,21	0,19	0,17	0,18	0,27	0,19	0,22
Jepara	0,28	0,10	0,22	0,13	0,10	0,07	0,17	0,30	0,26
Demak	0,60	0,56	0,59	0,55	0,34	0,50	0,61	0,35	0,43
Semarang	0,30	0,45	0,25	0,45	0,08	0,16	0,18	0,22	0,16
Temanggung	0,47	0,39	0,43	0,29	0,05	0,11	0,39	0,19	0,17
Kendal	0,57	0,61	0,39	0,47	0,32	0,25	0,33	0,39	0,25
Batang	0,43	0,39	0,31	0,23	0,08	0,32	0,48	0,29	0,60
Pekalongan	0,46	0,49	0,36	0,31	0,20	0,29	0,39	0,43	0,31
Pemalang	1,24	0,80	1,00	0,83	0,57	0,68	0,77	0,57	0,60
Tegal	0,36	0,21	0,27	0,44	0,09	0,19	0,19	0,17	0,17
Brebes	0,93	1,16	0,78	1,04	0,47	0,67	0,74	0,66	0,87
Kota Magelang	0,31	0,23	0,32	0,21	0,19	0,24	0,15	0,06	0,12
Kota Surakarta	0,40	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54	0,27	0,20
Kota Salatiga	0,26	0,11	0,21	0,13	0,20	0,08	0,19	0,15	0,17
Kota Semarang	0,09	0,18	0,12	0,12	0,12	0,16	0,14	0,11	0,10
Kota Pekalongan	0,15	0,13	0,20	0,22	0,18	0,30	0,41	0,17	0,21
Kota Tegal	0,35	0,21	0,38	0,30	0,24	0,36	0,24	0,28	0,13
Jawa Tengah	0,65	0,63	0,57	0,45	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 5. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Rupiah), 2015-2023

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	273.828	292.525	307.041	320.106	337.572	351.735	363.367	384.955	419.429
Banyumas	320.585	344.514	357.748	366.442	385.140	406.250	417.086	441.520	479.027
Purbalingga	283.366	301.862	313.343	324.735	355.702	375.199	384.183	407.849	439.208
Banjarnegara	236.399	252.328	264.387	278.210	301.792	318.334	328.679	351.333	380.046
Kebumen	292.177	313.881	325.819	342.437	362.847	380.557	390.599	416.004	451.678
Purworejo	294.158	313.931	325.871	335.995	345.458	364.289	376.127	393.731	427.622
Wonosobo	275.180	297.422	308.553	323.490	340.827	362.683	373.474	399.180	425.105
Magelang	253.866	271.800	281.237	296.327	325.921	342.430	353.608	377.497	411.129
Boyolali	263.734	283.921	293.405	304.575	332.996	347.520	361.922	383.030	420.339
Klaten	340.484	364.240	376.305	397.447	405.537	419.510	436.896	458.872	488.102
Sukoharjo	303.030	327.217	337.037	345.363	377.319	393.776	410.273	434.318	476.675
Wonogiri	252.903	275.507	284.710	293.357	327.364	341.643	356.728	376.763	414.901
Karanganyar	303.056	329.531	340.538	348.896	365.151	385.563	401.542	424.677	465.703
Sragen	263.199	283.649	292.544	312.106	335.334	348.890	363.349	389.265	426.482
Grobogan	303.455	333.009	345.379	366.192	375.521	395.001	404.456	428.597	464.614
Blora	257.581	279.972	291.114	308.520	335.837	353.259	363.649	390.478	425.135
Rembang	314.596	338.986	354.440	365.443	384.561	403.932	414.977	441.482	477.514
Pati	347.575	377.442	393.817	414.316	423.922	445.913	458.616	486.855	532.545
Kudus	328.404	356.951	373.224	393.078	406.470	429.666	450.992	482.806	520.830
Jepara	314.422	341.754	355.607	371.296	386.693	407.056	419.028	442.618	479.131
Demak	328.529	356.919	371.525	402.211	411.202	432.533	445.176	471.818	511.145
Semarang	286.918	307.505	317.935	341.576	377.674	404.455	416.395	459.151	498.952
Temanggung	248.866	268.730	277.707	287.981	310.176	323.705	336.034	354.012	388.369
Kendal	301.449	323.078	335.497	353.127	369.769	396.691	407.387	433.864	465.936
Batang	224.437	240.541	249.292	256.549	286.116	309.202	318.330	341.252	378.858
Pekalongan	317.796	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662	416.779	441.765	480.934
Pemalang	298.622	319.434	331.584	351.183	372.115	389.209	401.857	429.549	467.204
Tegal	282.861	308.270	319.758	332.298	365.334	390.520	404.655	434.638	470.728
Brebes	340.538	364.059	382.125	405.932	414.642	431.897	445.853	472.326	513.339
Kota Magelang	405.228	425.191	450.908	476.582	481.282	522.099	537.783	575.130	602.794
Kota Surakarta	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	487.445	511.216	538.441	600.953
Kota Salatiga	337.511	345.146	359.944	380.856	418.955	454.154	480.903	518.815	565.031
Kota Semarang	368.477	382.160	402.297	427.511	474.930	522.691	543.929	589.598	642.456
Kota Pekalongan	352.717	375.600	390.555	415.172	425.026	460.789	480.415	513.243	565.998
Kota Tegal	371.528	395.631	418.845	455.488	465.047	502.031	523.413	565.826	623.617
Jawa Tengah	297.851	317.348	333.224	350.875	369.385	395.407	409.193	438.833	477.580

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Wilayah	Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Semarang	<SD	36,06	34,35	38,48	26,11	27,23	40,17	29,33	25,33	28,72
	Tamat SD/SLTP	54,98	54,41	51,67	49,18	59,39	45,34	48,86	59,36	54,91
	SLTA+	8,96	11,24	9,85	24,7	13,39	14,49	21,91	15,31	16,37
Jawa Tengah	<SD	35,47	30,96	30	31,82	30,31	29,51	28,05	23,58	24,04
	Tamat SD/SLTP	54,97	56,94	57,6	56,22	56,48	55,15	54,6	57,38	55,09
	SLTA+	9,56	12,1	12,4	11,97	13,21	15,34	17,35	19,04	20,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 7. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, 2015-2023

Uraian		Usia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Semarang	Angka Melek Huruf	15-24 th	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		15-55 th	97,49	94,92	97,66	100	97,67	100	99,44	97,25	99,07
	Angka Partisipasi Sekolah	7-12 th	100	100	100	100	97,85	100	100	96,19	100
		13-15 th	100	81,37	92,25	100	82,26	100	86,37	92,87	100
Jawa Tengah	Angka Melek Huruf	15-24 th	99,89	99,77	99,45	99,89	99,83	99,87	99,85	99,78	99,88
		15-55 th	96,87	97,07	97,35	97,17	97,29	97,8	97,63	97,44	97,90
	Angka Partisipasi Sekolah	7-12 th	99,16	99,73	99,8	99,49	99,76	99,57	99,39	99,41	98,98
		13-15 th	90,8	90,5	91,07	91,54	93,19	92,56	94,2	93,43	93,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2015	29,01	36,96
2016	33,87	38,28
2017	41,44	37,89
2018	38,40	39,93
2019	24,19	40,91
2020	38,78	40,83
2021	40,75	40,88
2022	40,52	41,42
2023	36,66	39,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2015	10,83	16,29
2016	15,22	18,88
2017	18,12	17,49
2018	23,04	19,82
2019	22,90	19,77
2020	29,17	20,59
2021	17,59	17,92
2022	22,41	20,05
2023	24,74	19,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 10. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Informal di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2015	60,16	18,92
2016	50,91	42,84
2017	40,44	44,62
2018	38,56	40,25
2019	52,91	39,32
2020	32,05	38,59
2021	41,66	41,19
2022	37,07	38,53
2023	38,59	41,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 11. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2015	44,08	29,79
2016	50,91	42,84
2017	22,63	27,48
2018	6,04	18,51
2019	34,93	24,38
2020	21,41	23,44
2021	28,69	29,14
2022	21,12	25,80
2023	23,9	26,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 12. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Non Pertanian di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Tahun	Presentase Penduduk Miskin	
	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
2015	26,91	33,25
2016	15,22	18,88
2017	35,93	34,63
2018	55,56	41,56
2019	40,88	34,71
2020	39,81	35,73
2021	30,56	29,98
2022	38,36	32,78
2023	39,44	34,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 13. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja (Persen), 2015-2023

Tahun	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Menurut Status Bekerja				
	Tidak Bekerja	Bekerja Sektor Formal	Bekerja Sektor Informal	Bekerja Sektor Pertanian	Bekerja Sektor Non Pertanian
2015	29,01	10,83	60,16	44,08	26,91
2016	33,87	15,22	50,91	50,91	15,22
2017	41,44	18,12	40,44	22,63	35,93
2018	38,4	23,04	38,56	6,04	55,56
2019	24,19	22,9	52,91	34,93	40,88
2020	38,78	29,17	32,05	21,41	39,81
2021	40,75	17,59	41,66	28,69	30,56
2022	40,52	22,41	37,07	21,12	38,36
2023	36,66	24,74	38,59	23,9	39,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 14. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Wilayah	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Semarang	Miskin	54,67	57,39	61,32	56,94	61,21	63,19	58,99	60,49	61,07
	Tidak Miskin	61,92	51,52	52,78	51,96	53,01	53,53	53,12	50,92	47,95
Jawa Tengah	Miskin	55,31	61,32	65,53	65,35	63,36	62,61	62,31	61,93	60,42
	Tidak Miskin	62,68	54,45	56,36	55,31	54,88	53,99	54,67	50,64	43,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 15. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Semarang	72,43	75,17	67,31	84,19	82,1	84,19	93,06	97,90	96,12
Jawa Tengah	70,63	69,12	68,84	70,05	70,09	74,45	90,12	90,62	91,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 16. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (Persen), 2015-2023

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Semarang	82,63	74,82	85,57	100	93,88	92,11	97,34	98,33	96,22
Jawa Tengah	74,29	76,65	78,26	81,91	85,07	87,73	88,72	96,83	91,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 17. Beberapa Indikator Makro Kabupaten Semarang, 2017-2023

Tahun	TPAK (%)	TPT (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	IPM
2017	76,37	1,78	5,65	7,78	73,2
2018	72,22	2,28	5,67	7,29	73,61
2019	74,38	2,58	5,39	7,04	74,14
2020	75,07	4,57	-2,67	7,51	74,10
2021	74,10	5,02	3,63	7,82	74,24
2022	75,42	4,81	5,31	7,27	74,67
2023	76,07	4,05	4,74	7,17	75,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 18. Beberapa Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah, 2017-2023

Tahun	TPAK (%)	TPT (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	IPM
2017	69,11	4,57	13,01	5,26	70,52
2018	68,56	4,51	11,32	5,3	71,12
2019	68,62	4,49	10,8	5,4	71,73
2020	69,43	6,48	11,41	-2,65	71,87
2021	69,58	5,95	11,79	3,32	72,16
2022	70,84	5,57	10,93	5,31	72,79
2023	71,72	5,13	10,77	4,98	73,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 19. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023

Kabupaten / Kota	20% atas	40% tengah	40% bawah
Cilacap	45,03	35,70	19,27
Banyumas	47,59	35,09	17,32
Purbalingga	44,58	35,24	20,18
Banjarnegara	45,65	35,88	18,48
Kebumen	42,22	37,40	20,38
Purworejo	42,54	36,69	20,76
Wonosobo	44,07	36,58	19,35
Magelang	43,69	37,28	19,03
Boyolali	44,76	36,32	18,92
Klaten	48,85	33,71	17,44
Sukoharjo	48,03	34,72	17,25
Wonogiri	43,15	37,78	19,08
Karanganyar	47,65	33,87	18,48
Sragen	42,39	37,47	20,13
Grobogan	41,00	38,52	20,48
Blora	44,04	35,85	20,11
Rembang	41,91	37,78	20,31
Pati	40,32	38,11	21,56
Kudus	43,42	37,14	19,44
Jepara	41,45	37,97	20,58
Demak	40,50	37,81	21,69
Semarang	46,56	35,78	17,65
Temanggung	44,84	35,64	19,52
Kendal	48,09	34,35	17,57
Batang	41,54	38,29	20,17
Pekalongan	41,56	37,73	20,71
Pemalang	42,38	37,37	20,26
Tegal	44,65	35,57	19,78
Brebes	41,27	37,90	20,83
Kota Magelang	49,32	34,62	16,07
Kota Surakarta	47,27	34,39	18,34
Kota Salatiga	48,82	35,58	15,61
Kota Semarang	47,55	35,97	16,49
Kota Pekalongan	42,46	35,93	21,61
Kota Tegal	46,01	35,56	18,43
Jawa Tengah	45,07	36,18	18,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023

Lampiran 20. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023

Kabupaten / Kota	Makanan	Nonmakanan	Total
Cilacap	569.249	526.661	1.095.911
Banyumas	618.502	645.200	1.263.702
Purbalingga	520.107	495.725	1.015.832
Banjarnegara	557.736	520.109	1.077.845
Kebumen	538.341	511.167	1.049.508
Purworejo	480.598	455.461	936.059
Wonosobo	575.976	504.597	1.080.574
Magelang	526.545	516.558	1.043.103
Boyolali	531.243	559.170	1.090.413
Klaten	533.057	688.279	1.221.336
Sukoharjo	593.017	788.747	1.381.764
Wonogiri	571.343	567.743	1.139.086
Karanganyar	547.427	647.319	1.194.746
Sragen	616.412	569.531	1.185.944
Grobogan	563.869	440.427	1.004.297
Blora	573.581	520.277	1.093.857
Rembang	620.893	538.670	1.159.563
Pati	695.833	668.215	1.364.048
Kudus	631.414	701.630	1.333.044
Jepara	569.721	485.344	1.055.066
Demak	661.983	573.332	1.235.315
Semarang	648.385	696.288	1.344.674
Temanggung	539.341	561.815	1.101.156
Kendal	608.947	633.579	1.242.526
Batang	588.789	538.373	1.127.161
Pekalongan	678.426	584.996	1.263.422
Pemalang	660.525	530.151	1.190.676
Tegal	567.650	498.364	1.066.013
Brebes	620.130	523.116	1.143.245
Kota Magelang	650.534	855.792	1.506.326
Kota Surakarta	737.025	938.307	1.675.332
Kota Salatiga	825.546	1.272.746	2.098.293
Kota Semarang	705.048	1.082.459	1.787.507
Kota Pekalongan	696.535	652.038	1.348.573
Kota Tegal	827.635	922.701	1.7503.36
Jawa Tengah	601.528	608.378	1.209.906

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2023



<https://semarangkab.bps.go.id>



ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Garuda No. 7 Ungaran 50511; Telp./Fax. (024)692109
Website: semarangkab.bps.go.id; Email: bps3322@bps.go.id